

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
(PKT)  
TAHUN 2018**

**PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA MAKASSAR**



**TAHUN ANGGARAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMRES SARAAN, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SYAMSUL HADI, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Makassar, 03 Januari 2018

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Makassar



(SYAMSUL HADI, SH.)

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Makassar



(JAMRES SARAAN, SH.,MH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018  
PENGADILAN NEGERI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara:	5 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	40 % 70 % 85 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	80 %
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 7.836.940.000
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp. 52.400.000

Makassar, 03 Januari 2018

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Makassar



(SYAMSUL HADI, SH.)

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Makassar



(JAMRES SARAAN, SH.,MH)